



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://klipping.dpr.go.id>

Judul : Lembaga Internasional Beri Peringatan
Tanggal : Rabu, 29 Juli 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

Lembaga Internasional Beri Peringatan

Pengunduran diri mendadak Gubernur Bank Indonesia dinilai berisiko meningkatkan ketidakpastian terhadap arah kebijakan moneter Indonesia ke depan.

JAKARTA, KOMPAS — Lembaga pemeringkat internasional, S&P Global Ratings, memperingatkan, pengunduran diri mendadak Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berpotensi meningkatkan ketidakpastian terhadap arah kebijakan moneter Indonesia ke depan.

Hal ini dapat berkontribusi pada ketidakpastian yang lebih besar mengenai arah kebijakan moneter di masa depan dan respons kebijakan otoritas terhadap kondisi ekonomi yang terus berkembang," ujar Sovereign Analyst S&P Global Ratings Raim Yim, dalam keterangannya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (28/7/2026).

Walakin, ia menegaskan, perubahan kepemimpinan di tubuh bank sentral ini tidak berdampak langsung terhadap *sovereign credit rating* Indonesia. S&P tetap mempertahankan peringkat kredit berdaulat Indonesia pada level BBB+/A-2 dengan prospek stabil.

S&P menilai, tekanan fiskal yang dihadapi Indonesia belakangan ini bersifat sementara sehingga posisi fundamental ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini dinilai masih cukup solid setelah melewati serangkaian tantangan sepanjang tahun.

Meski secara umum masih cukup solid, Yim menyatakan akhir-akhir ini BI telah mendapat tekanan untuk mendukung agenda Presiden Prabowo. Nilai tukar rupiah sempat tertekan hingga menembus rekor terendah di atas Rp 18.000 per dolar AS pada Juni 2026.

Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mengalami fluktuasi ketat seiring langkah investor luar negeri yang mengambil sikap *wait and see*.

Sejak Senin (27/7), perdagangan saham cenderung melemah di kisaran 6.100 karena berbagai faktor, termasuk kabar dari BEI Selasa (28/7). IHSG masih berada di zona merah. Pada sesi penutupan IHSG berada di level 6.500 atau melemah 0,99 persen dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya.

Dominasi fiskal
Laporan riset dari Sinarmas Sekuritas, Selasa (28/7), menyoroti dua kekhawatiran utama yang kini membayangi persepsi para pelaku pasar.

Pertama, muncul kekecemasan mengenai potensi terjadinya *fiscal dominance*, yaitu kondisi di mana arah kebijakan moneter bank sentral cenderung disetar atau dikompromikan demi mendukung agenda fiskal pemerintah.

Kedua, timbul kekhawatiran terkait potensi melemahnya independensi BI. Pelaku pasar dinilai masih mencermati proses transisi Gubernur BI yang baru. Apabila pemerintah mampu memas-

tikan suksesi berlangsung transparan dan independen, BI tetap terjaga. Dampak negatif terhadap pasar diperkirakan terbatas.

"Jika independensi bank sentral dipertanyakan melemah, pasar khawatir keputusan suku bunga acuan dan kebijakan nilai tukar tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada kondisi ekonomi," kata Sinarmas Sekuritas.

Sejumlah ini, kabar pengunduran diri Perry Wardito juga menjadi perhatian luas lembaga pemeringkat internasional dan media global. Selain S&P, Sinarmas Sekuritas menyebutkan lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menilai pengunduran diri Perry yang mendadak kian mempertebal ketidakpastian arah kebijakan moneter di tengah kondisi ekonomi yang penuh tekanan eksternal.

Fitch Ratings menyatakan akan mencoretnya secara ketat setelah penunjukan Gubernur BI definitif. Mengingat Fitch, selama transisi kepemimpinan, tidak mampu membuatkan indeks pendensi dan kredibilitasnya, rupiah dan pasar keuangan Indonesia akan mengalami tekanan terhadap gejolak ekonomi global.

Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Investor, Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) Iwan Susandi, Selasa (28/7), mengharapkan investor tidak panik dengan dinamika sosial dan politik. Pasar keuangan Indonesia sudah mengalami berbagai dinamika yang berat sepanjang tahun ini.

"Tahun ini, kan, memang tahun yang *rough* sekali. Selama ini, saya lihat investor masih sangat *confident* dengan *market* kita. Jadi, saya yakin investor juga punya penilaian yang baik," ujarnya.

Pemilihan Gubernur BI

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Prako, menyampaikan, mekanisme penggantian Gubernur BI akan mengacu pada dasar konstitusional, yakni Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945.

Dasar hukum pengangkatan Gubernur BI adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU No 4/2026 tentang Pemerintahan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PUSK).

"Kami meneguhkan bahwa mekanisme yang ditempuh harus sepenuhnya mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi independensi Bank Indonesia sesuai ketentuan tertulis, Selasa (28/7).

Dalam undang-undang tersebut, diatur beberapa hal teknis, mulai dari persyaratan, mekanisme pengangkatan, masa jabatan, hingga

pemberhentian anggota Dewan Gubernur BI.

Fauzi menjelaskan, peran Komisi XI DPR adalah menjalankan fungsi konstitusional DPR dalam memberikan persetujuan terhadap calon yang diajukan Presiden. Setelah menerima pengusulan dari Badan Musyawarah DPR, Komisi XI akan menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) secara terbuka.

Hasil uji kelayakan tersebut kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk memperoleh persetujuan sebelum Presiden menetapkan dan melantik Gubernur Bank Indonesia," ujarnya.

Fauzi menambahkan, tidak ada batas waktu yang ditentukan secara spesifik terkait proses tersebut dalam undang-undang. Namun, berdasarkan pengalaman, pemilihan mulai dari DPR memerlukan usulan nama calon dari Presiden, lalu uji kelayakan di Komisi XI DPR, hingga pengambilan keputusan di Rapat Paripurna yang memakan waktu 1-2 minggu.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prako, menyampaikan, jabatan Gubernur BI saat ini diisi oleh Deputy Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebagai Penjabat Gubernur.

Penetapan ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 50 Ayat (2) UU BI. Adapun tersebut menyebutkan, Deputy Gubernur Senior akan menjalankan tugas pekerjaan Gubernur selama Gubernur yang baru belum diangkat.

Ekonom dari Bright Institute, Yanuar Rizky, berpendapat, publik tidak bisa berharap banyak terhadap pemilihan Gubernur BI. Berkat dari pemilihan otoritas keuangan sebelumnya, yang terjadi justru dominasi kekuasaan dengan lemahnya parlemen. "Jadi, sosok yang dipilih akan ke figur yang juga tidak terlalu kuat dan cenderung akomodatif terhadap program atau narasi Presiden," katanya.

Fadhalah, saat ini Indonesia sedang menghadapi situasi makroekonomi yang tidak mudah. Idealnya, Gubernur BI adalah seorang yang memang memahami *game theory* moneter dengan baik. Itu mengacu independensi menjadi penting, termasuk terhadap fiskal pemerintah. Jika harus menanggapi fiskal pada saat situasi global juga meredam, harus ada kemampuan memilih *trade-off* untuk kepentingan stabilitas itu sendiri," tuturnya.

Walakin, menurut dia, kondisi ideal itu akan sulit terjadi mengingat arus politik pemerintah dan parlemen cenderung memiliki kepercayaan diri yang berlebihan. Hal ini menambah sentimen spekulasi di tengah persepsi negatif atas tata kelola kebijakan. (GDK/ADP)